

BILITY ACCOUNTA
ION TRANSPA
TICIPATION PUBLIC

LAPORAN PELAKSANAAN OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012

OPEN GOVERNMENT INDONESIA: ERA BARU KETERBUKAAN PEMERINTAH



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

PARTICIPATI
PATION OPEN
COUNTABILITY

DAFTAR ISI

Hal	Isi
2	Ringkasan Eksekutif
4	Pendahuluan
6	Strategi dan Komitmen Indonesia Keterbukaan yang Berkelanjutan
8	Platform dan Instrumen Kerja Fondasi Kokoh Penunjang OGI
12	Pencapaian Inisiatif OGI Perubahan Nyata Melalui Kepedulian Bersama
17	Tantangan Implementasi Pemacu Kolaborasi dan Sinergi
18	Kesimpulan dan Hikmah Ajar 2012 - Tahun Ambisius dan Disertai Keberhasilan Terbangunnya <i>Ownership</i>
20	Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Benih-benih keterbukaan telah dirintis sejak reformasi politik di tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan. Semenjak saat itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera. Pemerintahan yang dulunya tertutup dan terpusat, mulai semakin terbuka.

Pada 2004, desentralisasi pemerintahan mulai dicanangkan. Sistem ini mendorong pemerintah daerah untuk memiliki peran serta yang lebih aktif dalam membangun daerahnya. Disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 2008 dan semakin maraknya pemanfaatan telepon genggam, internet, dan media sosial menciptakan dorongan yang lebih besar dan kuat agar pemerintah lebih terbuka. Bagi Indonesia, era baru keterbukaan pemerintah telah tiba. Pemerintahan yang terbuka (*Open Government*) menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat.

Semangat keterbukaan ini jugalah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global *Open Government Partnership* (OGP) pada bulan September 2011. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 58 negara yang mewakili lebih dari 2 milyar penduduk dunia. Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan negara yang lebih baik. Negara

yang dicita-citakan OGP adalah negara yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI secara konsisten mengungkapkan komitmennya pada *Open Government*. Dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkata,

“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government “.

Di dalam negeri, melalui gerakan *Open Government Indonesia* (OGI), pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah, yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi. Program dan rencana aksi OGI di tahun 2012 yang berjumlah 38, ditujukan untuk menjawab 3 dari 5 Tantangan Utama OGP, yaitu peningkatan layanan publik, peningkatan integritas aparatur pemerintah, dan manajemen sumber daya publik yang efektif dan transparan.

Sejak awal, penyusunan dan pengawalan pelaksanaan program OGI telah diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat yang secara sukarela telah tergabung dalam Tim Inti Open Government Indonesia. Tim Inti OGI inilah yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI.

Progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Salah satu program pada tahun 2012 adalah kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya.

Upaya terobosan lain dalam *Open Government* di Indonesia termasuk beroperasinya portal Satu Layanan, yang saat ini telah berisi lebih dari 100 modul informasi layanan warga negara, mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.

Dalam sisi kelembagaan, *Open Government* di Indonesia juga mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan 21% Pemerintah Daerah.

Kegembiraan atas capaian OGI juga diraih dalam hal keterbukaan anggaran. Dalam survey *Open Budget Index* (OBI) Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 di tahun 2010 menjadi 62 di tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama (*Significant Information*) dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survey transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh *Open Budget Partnership* (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survey keterbukaan anggaran di 100 negara.

Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma: OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan *civitas*

akademika bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan nampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.

Tahun 2012 merupakan tahun penetapan fondasi, pelaksanaan percepatan inisiatif yang ada, dan penciptaan terobosan baru. Selama masa implementasi OGI pada tahun 2012, banyak pembelajaran yang bisa dipetik agar Pemerintah Indonesia bisa menyempurnakan komitmen *Open Government* pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, OGI harus memperkokoh sistem yang mendukung transparansi pemerintah dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi publik. Dengan begitu, penerapan *Open Government* di segala lini pemerintahan akan lebih terarah, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.

“...pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias.”

PENDAHULUAN

Dimobilisasi oleh gerakan reformasi yang sudah gerah dengan tata kelola pemerintahan yang tertutup dan korup, sejak 1998 di Indonesia terjadi transformasi besar-besaran dalam berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan ini menghembuskan angin kebebasan dan mendorong partisipasi publik. Reformasi ini juga merupakan tonggak awal terjadinya perubahan mengubah tata kelola pembangunan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang mulai diterapkan pada 2004. Momentum-momentum perubahan menuju keterbukaan inilah yang harus terus dijaga dan dikobarkan agar bola salju perbaikan tetap bergulir.

Tidak hanya melakukan berbagai perbaikan internal, Indonesia juga semakin mengukuhkan perannya dalam percaturan regional dan global. Saat ini Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dan menerima pengakuan dunia atas iklim demokrasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia adalah anggota aktif dari berbagai organisasi multinegara, seperti ASEAN dan G-20.

Untuk itu, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas; tidak hanya tanggung jawab internal kepada warga negara, tapi juga tanggung jawab moral untuk memberikan panutan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan pemain kunci dalam percaturan politik dunia. Dalam menjalankan tanggung jawab ini ada banyak tantangan yang menghadang, yang banyak di antaranya bisa dihadapi dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka, Indonesia bisa mendorong peningkatan layanan publik, perbaikan integritas

aparatur pemerintah, dan pengefektifan tata kelola sumber daya publik, yang pada akhirnya akan menjadi fondasi untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

REFORMASI (~1998)



Membuka pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik

DESENTRALISASI (~2004)



Memperkuat peran daerah dalam menentukan arah pembangunan

OPEN GOVERNMENT (~2011)



Mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan

Momentum perbaikan ini semakin diperkuat dengan komitmen Presiden RI di kancah internasional, yang pada September 2011 Pemerintah Indonesia secara resmi menjadi salah satu dari 8 negara pendiri inisiatif *Open Government Partnership* (OGP) di New York, Amerika Serikat. Seluruh negara anggota OGP yang berjumlah 58 berkomitmen untuk menjalankan agenda *open government* dengan mencanangkan rencana aksi yang mendorong transparansi, memberdayakan partisipasi publik, dan meningkatkan inovasi. Tidak hanya itu, pada September 2012 Indonesia –bersama dengan

Inggris– dipercaya menjadi *co-chair* OGP yang akan mengendalikan arah inisiatif ini di seluruh dunia. Nantinya, pada September 2013, Indonesia akan menjadi *lead chair* OGP.

Untuk melaksanakan komitmen pada keterbukaan ini, di Indonesia digerakkan inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) yang memiliki 3 pilar utama: transparansi, partisipasi, dan inovasi. OGI digerakkan oleh Tim Inti OGI, yang terdiri dari beberapa wakil kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil (OMS), yang difasilitasi oleh sebuah Sekretariat OGI. Sejak awal, dalam penyusunan rencana-rencana dan prioritas open government, Tim Inti OGI telah melibatkan publik dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana aksi *open government*, seperti mengadakan *focus group discussion* (FGD), *workshop*, dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi massa dan media sosial berbasis internet.



Tim Inti Open Government Indonesia

Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses perencanaan dan pencapaian OGI. Dengan dipublikasikannya laporan ini, seluruh pemangku kepentingan terkait akan mendapatkan ruang untuk merefleksikan pencapaian inisiatif OGI. Melalui laporan ini juga, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus berinovasi dalam mendorong transparansi dan meningkatkan partisipasi publik, sebagai wujud nyata dari *open government*.

“Untuk melaksanakan komitmen pada keterbukaan ini, di Indonesia digerakkanlah inisiatif Open Government Indonesia (OGI) yang memiliki 3 pilar utama:

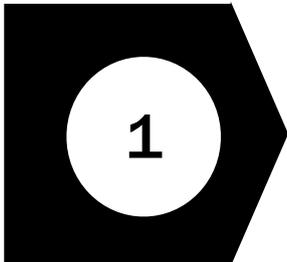
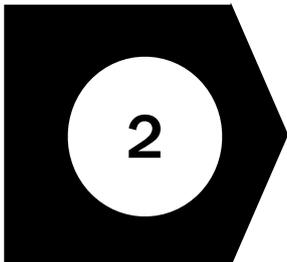
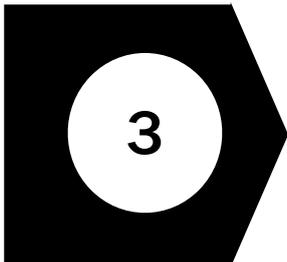
**transparansi,
partisipasi,
dan inovasi.”**

STRATEGI & KOMITMEN INDONESIA

KETERBUKAAN YANG BERKELANJUTAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendorong keterbukaan yang berkelanjutan. Rancangan program OGI didasari oleh 3 pilar *open government*, yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi. Dalam merancang program-program ini, Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa prioritas, yaitu memperkuat program-program pemerintah yang terkait transparansi, membuka informasi publik terkait hal-hal mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan menyusun rencana aksi yang mempromosikan partisipasi publik.

Maka, pada tahun 2012, tersusunlah 38 rencana aksi OGI, yang merinci komitmen *open government* yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Target dari rencana aksi ini dibuat sangat konkret dan spesifik untuk kemudian dimonitor secara ketat perkembangan capaiannya. Ke-38 rencana aksi ini dikelompokkan dalam 3 trek, sehingga kemudian *Rencana Aksi OGI 2012* disebut sebagai Strategi 3 Trek. Masing-masing trek ini memiliki fokus dan dinamika tantangan yang berbeda-beda, namun setiap trek saling berkaitan dan melengkapi dengan lainnya.

Trek	Definisi	Rencana Aksi
	Penguatan dan percepatan program berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat implementasi UU Keterbukaan Informasi (KIP) • Pelaksanaan Inpres yang ada
	Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Portal layanan publik (SatuLayanan.net) • Portal transparansi badan publik (SatuPemerintah.net) • Portal peta terintegrasi (One map)
	Inisiatif baru	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi/kab/kota sebagai <i>Pilot Project Open Government</i> • Inisiatif baru <i>open government</i>

Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat aktivitas yang sedang berjalan (*ongoing activities*) yang mendorong pada keterbukaan. Rencana aksi dalam Trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastruktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus di polisi.

Trek 2 berfokus pada pengembangan tiga portal yang memuat informasi penting yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Tiga portal ini adalah Portal Satu Layanan –yang berisi lebih dari 100 informasi layanan publik, Portal Satu Pemerintah –yang berisi data-data anggaran dan kinerja pemerintah, dan Portal Satu Peta – yang mengonsolidasi data geografi dan geospasial Indonesia dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan adanya portal, informasi yang sebelumnya ‘tersimpan’ menjadi ‘tersajikan’, dan diharapkan terjadi *snowball effect* yang mendorong semakin cepat dan baiknya kualitas informasi yang dibuka untuk publik.

Trek 3 meliputi upaya mendorong keterbukaan yang merupakan prakarsa baru, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun oleh institusi pemerintah lain. Mereka yang bersedia menjadi *local champion* akan didukung, difasilitasi, dan dijadikan *role model* sehingga semangat *open government* akan semakin cepat bergulir di lembaga dan daerah lainnya. Beberapa contoh program yang ada di dalam trek 3 adalah penancangan Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan penerapan open government. Selain itu, di Trek 3 pula ada *Kompetisi OG* yang memberi apresiasi bagi Kementerian/Lembaga yang telah melakukan perbaikan dalam layanan publiknya.

Rencana-rencana aksi ini dirumuskan melalui serangkaian proses yang transparan dan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan yang mewakili Kementerian/Lembaga, sektor swasta dan BUMN, serta akademisi dan masyarakat sipil. Melalui serangkaian *focus group discussion* (FGD), berbagai *workshop* –baik *workshop* terbatas

maupun gabungan pada tingkat nasional–, serta rapat-rapat teknis, rencana aksi ini dirumuskan, dibahas, serta direvisi secara bersama-sama.

Focus Group Discussion

Penyelenggaraan focus group discussions FGD dilakukan oleh universitas, sehingga independen dalam menjangkau aspirasi “Apa yang Dimaksud dengan Keterbukaan” dan “Keterbukaan Apa yang Diinginkan oleh Masyarakat”.

Sebagai masukan awal dari rencana aksi OGI, telah diselenggarakan FGD sebanyak 31 kali di berbagai lokasi di seluruh Indonesia untuk mengetahui ketertarikan masyarakat dari berbagai lapisan tentang arti keterbukaan, manfaat keterbukaan, dan apa yang diharapkan masyarakat dengan memiliki pemerintahan yang terbuka dan masyarakat yang sadar keterbukaan. Hal ini juga sebagai bentuk awal sosialisasi tentang era baru keterbukaan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik diberikan kesempatan untuk menyusun rencana implementasi keterbukaan di lembaganya masing-masing, yang kemudian dibahas bersama dalam kelompok FGD di forum konsultasi publik untuk menghasilkan draft rencana aksi OGI. Selanjutnya draft rencana aksi dimaksud kembali dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan (proses penajaman) untuk menghasilkan *Rencana Aksi OGI* yang bersifat final. Alhasil, sebagai bukti nyata atas semangat perubahan ini, rencana aksi yang awalnya berjumlah hanya 11 aktivitas berkembang menjadi 38 aktivitas. Seluruh *Rencana Aksi OGI 2012* dapat dilihat pada <http://opengovindonesia.org/?p=684>.

PLATFORM DAN INSTRUMEN KERJA FONDASI KOKOH PENUNJANG OGI

Gerakan OGI dimulai dengan terbentuknya secara sukarela tim kerja yang merupakan kolaborasi erat antara unsur pemerintah dengan masyarakat sipil. Berbagai ide terobosan dihasilkan oleh tim kerja tersebut, mulai dari Strategi 3 Trek, berbagai sarana komunikasi melalui website dan media sosial, forum peningkatan pemahaman dan pembelajaran akan keterbukaan pemerintah, sampai dengan mekanisme pemantauan pelaksanaan gerakan OGI. Strategi 3 Trek dan platform kerja OGI tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang demi keberhasilan dan keberlanjutan gerakan OGI.

Bab ini akan mengulas tentang platform-platform yang mendukung terlaksananya strategi OGI, meliputi:

- a) motor penggerak bergulirnya inisiatif OGI
- b) aktivitas OGI yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman dan semangat OGI
- c) media yang menjadi saluran komunikasi dua arah
- d) mekanisme pemantauan pencapaian rencana aksi OGI,
- e) berbagai dukungan kolaboratif dari seluruh masyarakat Indonesia untuk OGI.

Seluruh platform ini bekerja bersama sebagai satu kesatuan yang saling menunjang demi keberhasilan dan keberlanjutan gerakan OGI.

A. Tim Inti Open Government Indonesia

OIG memiliki sebuah tim kerja kecil yang disebut dengan Tim Inti OGI yang berfungsi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan strategi OGI. Embrio Tim Inti OGI adalah sebuah pertemuan yang diadakan pada 27 Juli 2011 di Kantor Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Rapat ini

menindaklanjuti komitmen Indonesia sebagai salah satu pendiri OGP. Di dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) ini didiskusikan cara untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam OGP sehingga dapat mendorong perubahan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik.

Di dalam rapat ini diputuskan untuk membentuk sebuah tim kerja yang disebut Tim Inti OGI yang terdiri dari 5 institusi pemerintah dan 4 organisasi masyarakat sipil. Kesembilan organisasi ini bekerja dalam kedudukan yang setara dan memiliki suara yang sebanding dalam menentukan arah OGI.

Anggota Tim Inti Open Government Indonesia

PEMERINTAH

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Komisi Informasi Pusat (KIP)

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Transparency International Indonesia (TII)

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Di tengah perjalanan, Tim Inti OGI menyadari adanya kebutuhan Sekretariat yang berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan operasional OGI. Maka, didirikanlah Sekretariat OGI pada April 2012. Sekretariat OGI memiliki 3 fungsi utama, yaitu manajemen program, manajemen media, dan manajemen hubungan pemangku kepentingan.



Fungsi Sekretariat OG

Melakukan fungsi pelaksana dan manajemen untuk implementasi OG sehari-hari

Memberikan laporan akan kemajuan implementasi OG dan evaluasinya

Menyalurkan aspirasi yang berkembang ke pelaksana OG

Menyelenggarakan konsultasi publik terhadap laporan hasil pelaksanaan OG dan evaluasinya

B. Forum Pengetahuan dan Pemberdayaan OGI

Open government adalah sebuah inisiatif yang tidak bisa berdiri sendiri. Program OGI perlu digulirkan, semangat OGI harus ditularkan, sehingga semakin banyak institusi pemerintah dan elemen masyarakat yang mendorong terciptanya *open government*. Singkatnya, perlu ada sebuah forum yang memperkuat dan memperluas pemahaman akan nilai-nilai dan berbagai praktek keterbukaan pemerintahan.

Salah satu cara untuk menyebarluaskan semangat OGI adalah dengan mengadakan *Knowledge Forum* OGI yang diselenggarakan 3 kali selama tahun 2012. Di dalam *Knowledge Forum* OGI seluruh pihak bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan *open government*. Tiga tema *Knowledge Forum* yang telah terselenggara di 2012 adalah efektifitas partisipasi publik, percepatan pembentukan PPID, dan reformasi keterbukaan anggaran.

APA ITU KNOWLEDGE FORUM?

Knowledge Forum adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. *Knowledge Forum* dilaksanakan bergiliran antara anggota Tim Inti OGI, baik institusi pemerintah maupun OMS.

Pengaturan ini memberikan pesan bahwa inisiatif OGI menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Selain itu, sistem penyelenggaraan Knowledge Forum yang bergantian menekankan bahwa kewajiban membagi pengetahuan dan semangat OGI dimiliki oleh seluruh anggota Tim Inti secara setara.

Selain itu, juga ada program *OGI Masuk Kampus* yang selama 2012 telah dilakukan di 4 universitas yang berbeda, yaitu Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Trisakti (Jakarta), dan Institut Teknologi Bandung (Bandung). Kegiatan ini bertujuan untuk merangkul anak muda untuk turut serta memberikan saran dan kritik konstruktif bagi pemerintah Indonesia, sembari memberikan pemahaman bahwa pemerintah Indonesia sedang berubah ke arah yang lebih baik.

C. Website, Media Sosial, dan Newsletter OGI

Website Open Government Indonesia (www.opengovindonesia.org) berisi informasi lengkap tentang definisi dan latar belakang OGI, detail kegiatan yang telah dan akan dilakukan, dan cara untuk ikut berkontribusi di dalam Sekretariat *Open Government Indonesia*. Selain itu, di dalam portal ini juga ada blog (blog.opengovindonesia.org) yang berisi tulisan dari para pendukung OGI. Sebagai contoh, tulisan pertama yang muncul di blog ini ditulis oleh seorang mahasiswa yang berkesempatan melakukan magang di Sekretariat OGI.

Akun Twitter @opengovIndo yang sudah memiliki follower lebih dari 2,400 orang, secara rutin memberikan informasi tentang Open Government Indonesia, mulai dari layanan yang baru saja diunggah di SatuLayanan.net, berbagai tulisan yang baru dimuat di blog, sampai live-tweet acara Open Government Indonesia yang sedang berlangsung.

Selain menjangkau masyarakat luas lewat media sosial di internet, OGI juga berupaya untuk menyebarkan semangat *open government* melalui media non-internet, seperti newsletter OGI, yang diterbitkan setiap dua bulan. Tema dalam tiap newsletter ini berbeda-beda, disesuaikan dengan topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat itu. Sebagai contoh, newsletter yang terbaru mengangkat *headline* tentang *Open Budget Index 2012*, yang hasilnya baru saja dirilis dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan indeks keterbukaan anggaran yang paling tinggi di Asia Tenggara.

D. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi OGI

Untuk memastikan terlaksananya rencana aksi yang telah disepakati, maka dilakukan monitoring atas pelaksanaannya. *Monitoring* tersebut didasarkan atas target output yang telah disepakati pada masing-masing rencana aksi.

Hasil *monitoring* ini dilaporkan setiap 6 bulan dan disajikan dalam bentuk dokumen excel yang dinamai "Format 8 Kolom" yang berisi Rencana Aksi, Penanggung Jawab, Instansi Terkait, Kriteria Keberhasilan, Ukuran Keberhasilan, Ukuran Keberhasilan per 6 bulanan, Persen Capaian dan Keterangan. Format yang sederhana dan gamblang ini mempermudah seluruh anggota Tim Inti dan masyarakat untuk ikut memantau pencapaian *Rencana Aksi OGI*.

Peran penting lain yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi adalah upaya *de-bottlenecking* untuk rencana aksi yang tidak berjalan sesuai rencana. Dalam upaya *de-bottlenecking*, para pemangku kepentingan yang terkait akan duduk bersama untuk mengupas permasalahan dan menemukan akar permasalahan yang telah menghambat tercapainya target. Ada beberapa contoh upaya yang dilakukan UKP4 dalam rangka *de-bottlenecking* seperti:

1. Mendorong Kementerian Keuangan melakukan publikasi data keuangan negara termasuk pengelolaan dan realisasi anggaran melalui rapat koordinasi dan penyampaian surat dan contoh dokumen sebagai acuan dokumen *citizen budget*.
2. Mendorong pendirian PPID di 8 Kementerian/Lembaga dengan cara mendukung penyelenggaraan *workshop* untuk seluruh K/L, penyampaian surat UKP4 khusus yang bertujuan untuk mengingatkan percepatan pendirian PPID, serta monitoring progres status pendirian PPID.

E. Kolaborasi: Keterlibatan dan Bantuan Pihak dari Luar Pemerintah

Pada awal implementasi rencana aksi OGI, institusi pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang diharapkan menjalankan rencana aksi yang dimaksud. Sikap skeptis dari pihak non-pemerintah terasa begitu kuat. Hal tersebut dapat dipahami mengingat jalan panjang yang dilalui dalam memperjuangkan keterbukaan informasi oleh pihak non-pemerintah, khususnya oleh

organisasi masyarakat sipil. Kondisi tersebut diperparah dengan belum juga terimplementasinya secara luas UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), meskipun UU tersebut sudah disahkan sejak tahun 2008 dan mulai diimplementasikan secara nyata pada 2010.

Namun, berkat kerja keras oleh Tim Inti OGI selama hampir 2 tahun ini, kepercayaan mulai tumbuh, dan tawaran dukungan/bantuan dari berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan OGI mulai bermunculan:

1. **Organisasi Multilateral dan Donor.** OGI bekerja sama dengan *World Bank* untuk menyusun rencana replikasi program yang mendorong transparansi sekolah di Filipina: *Check My School*. Selain itu, *Ford Foundation* telah bekerja sama dalam berbagai aktivitas OGI seperti *Knowledge Forum* dan proyek percontohan OGI.
2. **Universitas.** Berbagai universitas, di antaranya *Paramadina*, *Bina Nusantara*, *Trisakti*, *Universitas Indonesia*, *ITB*, *Universitas Sumatera Utara*, dan *Universitas Hasanuddin* telah mendukung diseminasi informasi dan kegiatan OGI.
3. **Perusahaan.** Tim konsultan dari *Boston Consulting Group (BCG)* bekerja selama sebulan untuk menganalisa pengembangan strategi pelaksanaan OGI. Selain *BCG*, *IBM* telah membantu pengembangan infrastruktur teknis yang menunjang aplikasi dan sistem informasi OGI.
4. **Individual.** Semakin banyak mahasiswa yang ingin bergabung sebagai pemegang dan profesional yang ingin bergabung sebagai sukarelawan untuk membantu program-program OGI. Berbagai kontribusi yang telah dilakukan pemegang dan sukarelawan ini antara lain menyusun newsletter, melengkapi portal Satu Layanan, memutakhirkan website OGI, dan mendukung berbagai aktivitas OGI seperti *Kompetisi OGI*, *Knowledge Forum*, dan proyek percontohan OGI.

**“... kepercayaan mulai tumbuh,
dan tawaran dukungan/bantuan dari
berbagai pihak yang ingin berpartisipasi
dalam kegiatan OGI mulai bermunculan.”**

PENCAPAIAN INISIATIF OGI

PERUBAHAN NYATA MELALUI INISIATIF BERSAMA

Momentum penting peluncuran gerakan OGP pada September 2011 telah menyulut antusiasme berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan terbuka. Dalam bab ini akan dipaparkan pencapaian OGI pada tahun 2012, yang meliputi 38 rencana aksi. Di antara ke-38 rencana aksi ini, 12 di antaranya adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam OGP, dan 26 lainnya adalah rencana aksi tambahan OGI.

A. Rencana Aksi Indonesia dalam OGP 2012 dan Pencapaiannya

Rencana aksi Indonesia dalam OGP tahun 2012 terdiri dari 12 rencana aksi, yang secara umum telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Ke-12 rencana aksi ini berfokus pada transparansi di bidang-bidang yang:

- a) rentan akan terjadinya tindak korupsi,
- b) menyangkut layanan dasar masyarakat, dan
- c) berpotensi untuk menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.

Beberapa bidang yang tersentuh rencana aksi ini adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan tata ruang.

Secara umum, rencana-rencana aksi yang telah mencapai hasil yang signifikan adalah yang berkaitan dengan transparansi data atau dokumen yang menyangkut layanan dasar masyarakat yang dilakukan melalui *website* instansi tersebut. Sedangkan rencana aksi yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi publik masih belum berjalan sesuai dengan harapan.

Secara lebih detail, progres implementasi kesebelas rencana aksi Indonesia dalam OGP tahun 2012 adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Pelayanan Publik

1. Transparansi implementasi pengentasan kemiskinan, termasuk mendorong keterlibatan publik sejak awal perumusan program.

Progres: Data penerima bantuan Beras Miskin telah terpublikasi melalui poster di kantor kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengetahui nama-nama penerima bantuan.

2. Transparansi implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP melalui publikasi data tiap sekolah di 411 Kabupaten/Kota.

Progres: Data alokasi BOS telah dipublikasikan melalui *website* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disertai dengan publikasi kinerja layanan pengaduan menyangkut BOS. (<http://bos.kemdiknas.go.id/home/berita/48> dan <http://bos.kemdiknas.go.id/pengaduan/>)

3. Transparansi implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui publikasi data seperti anggaran, daftar penerima, mekanisme, dan prosedur layanan untuk setiap Puskesmas di 497 Kecamatan.

Progres: Publikasi data telah dilakukan melalui *website* Kementerian Kesehatan meliputi jumlah alokasi dan realisasi berdasarkan Puskesmas di 497 Kabupaten/Kotamadya. (<http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/berita-bok/daftar-alamat-website-26-kabkota-og-bok>)

B. Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah

4. **Transparansi layanan publik yang dilaksanakan oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan melalui publikasi organisasi, pejabat, jenis layanan, prosedur/mechanisme layanan termasuk besar biaya dan waktu yang dibutuhkan, informasi perkembangan kasus, dan laporan tahunan melalui website.**

Progres: Publikasi data telah dilakukan melalui *website* Mabes Kepolisian (<http://www.polri.go.id/>) dan Kejaksaan Agung termasuk informasi perkembangan status perkara (<http://www.kejaksaan.go.id/index.php>).

5. **Transparansi pada Kantor Pajak, Kantor Imigrasi, dan Kantor Bea dan Cukai. Data yang dipublikasikan berupa organisasi dan profil pejabat, jenis layanan, prosedur/mechanisme layanan meliputi besar biaya dan waktu yang dibutuhkan, informasi perkembangan status layanan, serta laporan tahunan melalui website.**

Progres: Publikasi data informasi telah dilakukan pada *website* Pengadilan Pajak (<http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/>), *website* Dirjen Imigrasi (<http://www.imigrasi.go.id/index.php>), dan *website* Dirjen Bea dan Cukai (<http://www.beacukai.go.id/>), meski informasi status layanan masih belum tersedia.

6. **Transparansi pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pusat dan Daerah melalui publikasi data jabatan yang dibutuhkan termasuk jumlahnya, proses rekrutmen, kriteria seleksi, pengumuman hasil seleksi hingga akhir, dan ketersediaan serta publikasi keluhan masyarakat dan responnya.**

Progres: Peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan rekrutmen PNS secara online telah disusun. Akan tetapi, karena adanya kebijakan pemerintah untuk sementara tidak melakukan rekrutmen PNS, maka mekanisme ini belum diimplementasikan.

7. **Transparansi layanan publik di Kantor BPN melalui publikasi jenis layanan, prosedur/mechanisme layanan termasuk besar biaya dan waktu yang dibutuhkan, dan informasi perkembangan status layanan melalui website BPN.**

Progres: Pada *website* BPN (<http://www.bpn.go.id/layanan-pertanahan.aspx>) telah tersedia informasi menyangkut layanan sertifikasi pertanahan yang mencakup 5 layanan pertanahan dan 1 layanan pengaduan.

C. Manajemen Sumber Daya Publik yang Efektif

8. **Transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan negara melalui publikasi data APBN (Anggaran & Pendapatan Belanja Negara), RAPBN, RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian – Lembaga), pengeluaran periodik, laporan anggaran tahunan, laporan anggaran yang telah diaudit, dan citizen budget.**

Progres: Seluruh data pengelolaan anggaran telah dipublikasikan sesuai dengan target melalui *website* Kementerian Keuangan (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/citizen%20budget.pdf>, <http://www.depkeu.go.id/Ind/others/InformasiPublik/default.asp>). Hasil capaian menyangkut publikasi data Anggaran dimaksud selama periode tahun 2011 & 2012 telah mengangkat prestasi Indonesia dalam forum internasional sebagai negara terbaik di Asia Tenggara dan negara terbaik ketiga Asia (setelah Korea Selatan dan India) menurut *Open Budget Index* (OBI) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh *International Budget Partnership* (IBP), sebuah lembaga internasional independen.

9. **Transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan negara melalui publikasi data Pemerintah Daerah**

Progres: Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah telah menyediakan informasi publikasi dokumen keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

berbentuk tabel melalui <http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=transparansi> sehingga publik dapat melihat daerah mana yang tidak mempublikasikan dokumen keuangannya. Setidaknya terdapat 12 dokumen keuangan yang dijadikan target publikasi oleh daerah yang ruang lingkupnya serupa dengan indikator yang digunakan dalam penilaian *Open Budget Index* (OBI). Secara umum kinerja publikasi dokumen keuangan daerah masih rendah, namun setidaknya terdapat 3 Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota di wilayahnya) yang sudah cukup banyak mempublikasikan dokumen keuangannya yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DIY.

10. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan sistem e-procurement di 56 Kementerian & Lembaga (K/L).

Progres: Sejumlah K/L yaitu 546 Badan Publik (pusat & daerah) telah memanfaatkan e-procurement dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Informasi ini bisa dicek website LKPP (<http://www.lkpp.go.id/v3/>).

11. Mengembangkan Portal Satu Peta yang bertujuan untuk mengefisienkan pengelolaan hutan melalui digitalisasi data dan informasi yang menyangkut hutan primer dan sekunder dalam satu portal layanan.

Progres: Portal Satu Peta telah dioperasikan dan mempublikasikan peta dasar (*baseline*) dengan melakukan sinkronisasi data peta hutan dari 2 instansi berbeda yaitu Kementerian Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial. Telah diberlakukan juga mekanisme penyampaian masukan oleh masyarakat dalam rangka penyempurnaan peta dimaksud melalui *website*.

Portal Satu Peta

Sebuah portal (<http://tanahair.indonesia.go.id/>) yang akan menjawab berbagai permasalahan perbedaan data dan pendapat tentang area/wilayah yang menjadi dasar penting untuk berbagai pengambilan keputusan.

12. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di bidang lingkungan, SDA, dan data spasial dari industri ekstraktif (berupa informasi penerimaan negara di pusat & daerah), serta melalui pembentukan forum multi-stakeholders dalam perencanaan pengembangan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dan publikasi dokumen RTRW melalui website.

Progres: Publikasi atas penerimaan negara dari hulu migas yang ada pada website BP Migas dan publikasi dokumen rencana dan peraturan daerah menyangkut RTRW melalui website (<http://www.ekon.go.id/pages/opengov>) telah dilakukan.

B. Rencana Aksi OGI 2012 dan Program Lainnya

Selain 12 rencana-rencana aksi yang menjadi komitmen Indonesia pada OGP, terdapat 26 rencana aksi lain yang mencakup:

- a) pemberantasan korupsi,
- b) peningkatan kualitas program rakyat,
- c) penegakan hukum,
- d) perluasan partisipasi publik,
- e) penguatan infrastruktur keterbukaan informasi.

Ke-38 rencana aksi ini diimplementasikan oleh berbagai institusi pemerintah di pusat dan di daerah (provinsi, kabupaten, kota).

Sesuai dengan Strategi 3-Trek, progres pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan setiap Trek adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Strategi 3-Trek, progres pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan setiap Trek adalah sebagai berikut:

1. Trek 1 - Penguatan dan Percepatan Program Berjalan

a. **PPID.** Seluruh kementerian di pemerintah pusat telah memiliki organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan unit pemberi layanan informasi publik.

b. **Komisi Informasi Provinsi.** Telah terbentuk Komisi Informasi Provinsi sebagai organisasi yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik di 19 Provinsi.

c. **Pengadilan Pajak.** Publikasi hasil putusan pajak telah dipublikasikan melalui *website* Pengadilan Pajak (<http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/>).

d. **Imigrasi.** Kantor Imigrasi telah mengoperasionalkan layanan permohonan paspor dan visa secara *online* melalui <http://www.imigrasi.go.id/> untuk mengurangi praktek pungutan liar.

e. **Layanan Online.** Beberapa *website* Kementerian Pemerintah Pusat telah mengoperasionalkan layanan permohonan informasi secara online, seperti Kementerian Perindustrian (<http://kemenperin.go.id/>), Kementerian Keuangan (<http://www.depkeu.go.id/Ind/>), dan Kementerian Perdagangan (<http://www.kemendag.go.id/id>).

f. **Layanan Kepolisian.** *Website* Kepolisian (<http://www.polri.go.id/>) telah mempublikasikan layanan permohonan pengurusan SIM secara *online*, transparansi soal ujian, dan prosedur layanan lainnya.

2. Trek 2 - Pengembangan Portal Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik

a. **Portal Satu Layanan** (www.satulayanan.net) dirancang sebagai portal berbasis komunitas di mana keterlibatan warga dan masyarakat sangat diperlukan dalam memberi masukan, mengisi konten, meningkatkan akurasi informasi, dan memelihara keberlanjutan konten yang tersedia. Saat ini portal Satu Layanan menyediakan lebih

dari 100 informasi layanan dasar masyarakat seperti pemasangan jaringan listrik dan telepon, pembuatan KTP, paspor, visa, dan akta, serta berbagai informasi beasiswa pendidikan. Portal ini telah dikunjungi oleh lebih dari 55.000 pengunjung dan akan di-*launch* secara resmi pada April 2013.

b. **Portal Satu Pemerintah** (www.satupemerintah.net) telah bisa diakses meski masih dalam tahap pengembangan. Portal ini menyediakan informasi profil organisasi Badan Publik Pemerintah, tugas dan fungsi, anggaran, program kerja, dan informasi lainnya untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah.

3. Trek 3 - Inisiatif Baru

a. **Proyek Percontohan.** Sedang dijalankan kegiatan proyek percontohan *Open Government* di 3 daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berfokus pada transparansi anggaran daerah, transparansi dana BOS dan layanan kesehatan, serta operasionalisasi PPID. MOU proyek percontohan telah ditandatangani pada Bulan November 2012, dan salah satu hasil proyek percontohan ini adalah telah terpublikasinya laporan keuangan di Kota Ambon di *websitenya* (<http://www.ambon.go.id/index.php/transparansi-anggaran.html>).

b. **LAPOR!** (www.lapor.ukp.go.id). LAPOR! adalah akronim dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Melalui LAPOR!, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka dan mengadukan layanan publik ataupun kualitas infrastruktur yang tidak memuaskan, baik melalui *website* (www.lapor.ukp.go.id) atau melalui SMS ke 1708.

c. **Kompetisi OG** adalah kompetisi antar-unit layanan publik yang melibatkan 34 K/L dan mengikutsertakan 62 layanan publik. Kompetisi ini telah membangun semangat bersaing positif antara K/L selama 3 bulan periode lomba (April 2012 - Agustus 2012) dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penghargaan kepada 10 Unit Layanan Paling Progresif diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI.

KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK OPEN GOVERNMENT 2012

Kompetisi OG merupakan ajang penanaman nilai-nilai keterbukaan yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk layanan pemerintah kepada warganya. Selama berlangsungnya Kompetisi OG, ada tiga tahapan yang harus dilewati. Tahap pertama adalah pendaftaran, di mana setiap Kementerian/Lembaga bisa mengajukan maksimal 2 unit layanan publik untuk mengikuti kompetisi. Tahap kedua adalah penyisihan, di mana setiap unit layanan publik setiap awal bulan memberikan laporan tertulis tentang perkembangan perbaikan di unit mereka masing-masing. Setelah itu, Dewan Juri (yang terdiri dari pakar inovasi, tokoh antikorupsi, tokoh layanan publik, dan pakar media) berdiskusi untuk menentukan 20 Besar. Dalam Tahap Penilaian Akhir, 20 Besar diminta untuk mempresentasikan perbaikan-perbaikannya di depan Dewan Juri.



Selama 3 bulan, seluruh peserta Kompetisi OG diajak untuk mengikuti berbagai rangkaian acara untuk meningkatkan pemahaman tentang OG dan kapasitas instansi pemerintah untuk menerapkan OG di lingkup kerjanya masing-masing.

Rangkaian acara ini antara lain berbagai workshop, kunjungan ke BKPM yang dinobatkan sebagai Layanan Publik Terbersih versi KPK, dan nonton bareng film 'Kita vs. Korupsi'.

Dan akhirnya, dalam acara Pemberian Penganugerahan Kompetisi OG, Wakil Presiden RI memberikan penghargaan kepada 10 Unit Layanan Paling Progresif, yaitu

1. Inatrade (KemenDag)
2. Sistem Penerbitan Paspor Kantor Imigrasi Jaksel (KemenKumHAM)
3. Beasiswa Bidik Misi (Kemdikbud)
4. Perizinan Frekuensi Radio (Kemkominfo)
5. National Traffic Management Center (POLRI)
6. Notifikasi Kosmetika (Badan POM)
7. Penilaian Keamanan Pangan (Badan POM)
8. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (POLRI)
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Kementerian PU)
10. Kantor Pertanahan Jakbar (Badan Pertanahan Nasional).

d. Mendorong Budaya Kerja 'Bersih' di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Transparency International Indonesia (TII) bekerja sama dengan

PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sejak 6 Maret 2012. Kampanye PLN BERSIH: NO SUAP! menyebar dari kantor pusat hingga unit lokal. PLN juga menandatangani deklarasi integritas bersama 35 vendor (termasuk di antaranya Siemens, AON, CG Power System, Dalle Energy, GE, dan Schneider Electric). Isi deklarasi ini adalah kesepakatan untuk melakukan bisnis tanpa suap-menyuap.

e. Portal Korupedia. Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan aktivis OMS lainnya dan jurnalis terkemuka meluncurkan www.korupedia.org. Portal ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada koruptor dan meningkatkan akses publik pada vonis terkait kasus korupsi. Hanya dalam satu minggu setelah peluncurannya pada 12 Juni 2012, portal ini telah diakses lebih 1 juta kali baik dari pengunjung dalam maupun luar negeri. Saat ini, Korupedia telah diisi informasi tentang hampir 200 koruptor dan terus bertambah.

f. Film Kita versus Korupsi. Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan film kampanye antikorupsi yang berjudul Kita vs Korupsi (KvsK). Sejak diluncurkan pada Januari 2012, film ini telah ditonton lebih dari 9 juta penonton termasuk Wakil Presiden Indonesia, beberapa Menteri, dan beberapa kepala lembaga negara. Film ini telah ditayangkan di 10 stasiun TV (termasuk beberapa TV nasional, TV lokal, dan TV kabel) dan di dalam perjalanan pesawat udara Garuda Indonesia dan Kereta Api Indonesia.

g. Suara Pemuda AntiKorupsi (SPEAK). Transparency International Indonesia (TII) menggerakkan anak-anak muda untuk melawan korupsi melalui inisiatif SPEAK (@ClubSPEAK) yang diluncurkan pada 2 Juli 2010. Untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2012 SPEAK menyelenggarakan SPEAK Forum, *Movimiento* dan SPEAK Goes to Campus. Pendekatan SPEAK yang unik dan sederhana telah menjadi percontohan gerakan anak muda antikorupsi lain di Vietnam, Nepal, Hungaria, Filipina dan Colombia. Aktivitas SPEAK sudah diliput oleh media-media nasional dan bahkan BBC London.

TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMACU KOLABORASI DAN SINERGI

Beragam tantangan dihadapi selama implementasi open government di Indonesia pada tahun 2012. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pemahaman Aparat Pemerintah.

Secara umum mayoritas instansi pemerintah belum memahami substansi UU Keterbukaan Informasi (KIP) meski UU tersebut sudah diterbitkan pada tahun 2008 dan berlaku sejak tahun 2010. Resistensi awalnya muncul karena ada anggapan bahwa keterbukaan informasi akan menciptakan pekerjaan tambahan atau membahayakan institusi. Resistensi ini terbukti dengan munculnya argumen dari beberapa K/L yang menyatakan keberatannya pada awal perumusan rencana aksi OGI.

2. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah.

Pemerintah memiliki keterbatasan SDM untuk membangun kapasitas pemahaman aparatnya menyangkut UU KIP. Di samping itu, implementasi OGI pada tahun 2012 didorong melalui optimalisasi sumber daya - termasuk anggaran- yang ada, dan bukan melalui penciptaan anggaran baru.

3. Perpaduan antara Kurang Mendalamnya Pemahaman Masyarakat Sipil & Ketidaksiapan Badan Publik.

Masyarakat sipil berperan besar dalam mendorong terbitnya UU KIP. Namun gelombang keterbukaan ini masih belum diikuti oleh pemahaman yang substansial. Banyaknya sengketa yang ditolak KI karena kesalahan prosedur menunjukkan bahwa masih tingginya persentase masyarakat sipil yang belum memahami substansi KIP, khususnya dalam proses mengajukan sengketa informasi. Di sisi lain, keaktifan masyarakat dalam mendorong badan publik untuk terbuka tidak diikuti dengan kesiapan badan publik dalam menyampaikan informasi yang diminta, sehingga tercipta sikap defensif yang justru tidak kondusif.

4. Rencana Aksi yang Terlalu Ambisius dan Tidak Terfokus.

Rencana Aksi OGI dirumuskan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan OMS, universitas, perusahaan swasta, dan BUMN. Karena saat itu pemerintah belum terbuka, konsultasi publik ini menghasilkan rekomendasi rencana aksi yang banyak, yaitu 38 rencana aksi, yang kemudian terbagi menjadi 127 sub-rencana aksi. Tidak hanya itu, seluruh rencana aksi ini meliputi begitu banyak bidang, termasuk pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas program rakyat, penegakan hukum, partisipasi publik, dan infrastruktur keterbukaan informasi. Dengan rencana aksi yang sangat ambisius ini menyebabkan tidak terfokusnya kinerja Tim Inti OGI.

KESIMPULAN DAN HIKMAH AJAR 2012 - TAHUN AMBISIUS YANG DISERTAI KEBERHASILAN TERBANGUNNYA OWNERSHIP

A. Kesimpulan

Melakukan perubahan yang menggoncangkan zona nyaman memang tidak mudah, termasuk ketika OGI berusaha menerapkan keterbukaan pemerintah di berbagai bidang. Namun begitu, kerja keras dan kesabaran dalam mengimplementasikan rencana aksi OGI, meski dihadang oleh tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas, membuahkan pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia. Semoga kesimpulan-kesimpulan di bawah ini juga dapat menjadi hikmah ajar bagi negara-negara lain yang juga berkomitmen untuk mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi di pemerintahan mereka.

Selama tahun 2012 ini, OGI telah menanamkan perubahan pola pikir pada pemerintah dan masyarakat, yang di antaranya adalah:

1. 'Keterpaksaan' yang Berubah Menjadi 'Rasa Memiliki (Ownership)'.

Unsur wajib yang sengaja diterapkan pada awal implementasi *Rencana Aksi OGI* membuat banyak badan publik, khususnya instansi pemerintah merasa terpaksa menjalankan *Rencana Aksi OGI*. Namun, ketika upaya mereka telah membuahkan hasil, banyak apresiasi yang datang dari berbagai pihak, termasuk dari K/L lain. Ini menginspirasi banyak K/L untuk melakukan lebih banyak aktivitas yang berkaitan dengan OGI. Saat ini banyak K/L justru dengan sukarela dan bangga melakukan beragam aktivitas di luar *Rencana Aksi OGI*.

2. 'Skeptisme' yang Berubah Menjadi 'Antusiasme'.

Perubahan sikap yang signifikan terjadi pada K/L yang ikut serta dalam kompetisi layanan publik OGI. Beberapa K/L yang awalnya menolak melakukan *Rencana Aksi OGI* baik dengan alasan anggaran tidak tersedia, maupun kekurangan SDM dan alasan lainnya, justru sangat antusias mengikuti lomba dan bangga bahwa mereka melakukan perubahan layanan publik dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa perlu anggaran tambahan.

3. 'Konservatif' yang Berubah Menjadi 'Inovatif'.

Pada awalnya pemahaman aparat dalam menjalankan *Rencana Aksi OGI* sangat terbatas. Ini tercermin dalam anggapan bahwa OGI hanyalah tentang mempublikasi sebuah dokumen tertentu di website. Kini, dengan terbangunnya iklim kompetisi antar-K/L maka terbangun juga kreativitas K/L untuk berinovasi, seperti memberikan layanan informasi online, membuat aplikasi simulasi layanan, dan menyempurnakan website sehingga lebih ramah bagi pengguna.

4. 'Milik Pemerintah' Berubah Menjadi 'Milik Bersama'.

Seiring dengan berjalannya waktu dan hasil yang dirasakan, berbagai pihak di luar Tim Inti OGI mulai berpartisipasi dalam implementasi OGI. Semakin banyak masyarakat sipil, universitas, organisasi multilateral, donor, pihak swasta, dan individu yang terlibat aktif dalam menyukseskan kegiatan OGI.

B. Hikmah Ajar untuk Komitmen Berkelanjutan Indonesia di tahun 2013

Belajar dari kesimpulan-kesimpulan di atas, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa hikmah ajar yang juga merupakan *best practices* untuk implementasi OGI di tahun 2013, seperti perumusan rencana aksi melalui konsultasi publik, penguatan sistem informasi dalam mendorong keterbukaan, dan fasilitasi atas badan publik yang memiliki inisiatif sendiri. Namun demikian, pada saat yang sama juga dilakukan beberapa perbaikan agar pelaksanaan OGI tahun 2013 menjadi lebih baik. Beberapa langkah penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Melibatkan Masyarakat Umum dalam Perumusan Rencana Aksi OGI.

Dengan semakin kuatnya kesadaran publik dalam mengikuti perkembangan implementasi OGI melalui media maka pada tahun 2013 masyarakat umum dapat memberikan masukan atas draft *Rencana Aksi OGI* yang dipublikasikan melalui berbagai media sosial (facebook, twitter) dan berbagai portal OGI (website OGI, LAPOR!).

2. Menyusun Rencana Aksi dengan Lebih Terfokus.

Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya di mana jumlah rencana aksi yang sangat banyak, area *Rencana Aksi OGI* yang luas, serta banyaknya objek institusi Pemerintah di Pusat dan Daerah, maka rencana aksi tahun 2013 dibuat fokus pada area yang langsung menyentuh masyarakat, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit tapi berdampak lebih signifikan.

3. Meningkatkan Promosi Kegiatan OGI.

Semenjak adanya partisipasi Indonesia di OGP, publikasi dan promosi menyangkut kegiatan dan capaian implementasi OGI hanya terbatas melalui *Knowledge Forum*, pameran atas undangan pihak lain, dan beberapa media sosial dan portal OGI. Pada tahun 2013 ini OGI akan melaksanakan lebih banyak promosi dan sosialisasi tentang OGI dan capaian implementasi rencana aksi OGI, dengan mengajak peran serta berbagai pihak, seperti K/L, OMS, universitas, dan pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan aktifitas tersebut.

4. Membentuk Tim Asistensi Pemberdayaan PPID.

Sebenarnya banyak institusi Pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas layanan informasi publik, namun terkendala terbatasnya tim yang memiliki keahlian khusus yang bisa membantu hal tersebut. Untuk itu perlu dibentuk tim asistensi yang melibatkan berbagai pihak yang kompeten, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga mempercepat proses penguatan dan peningkatan kapasitas di instansi pemerintah dalam mengelola informasi dan memenuhi kebutuhan informasi publik.



“Masyarakat umum dapat memberikan masukan atas draft rencana aksi OGI yang melalui berbagai media sosial dan portal OGI.”

LAMPIRAN

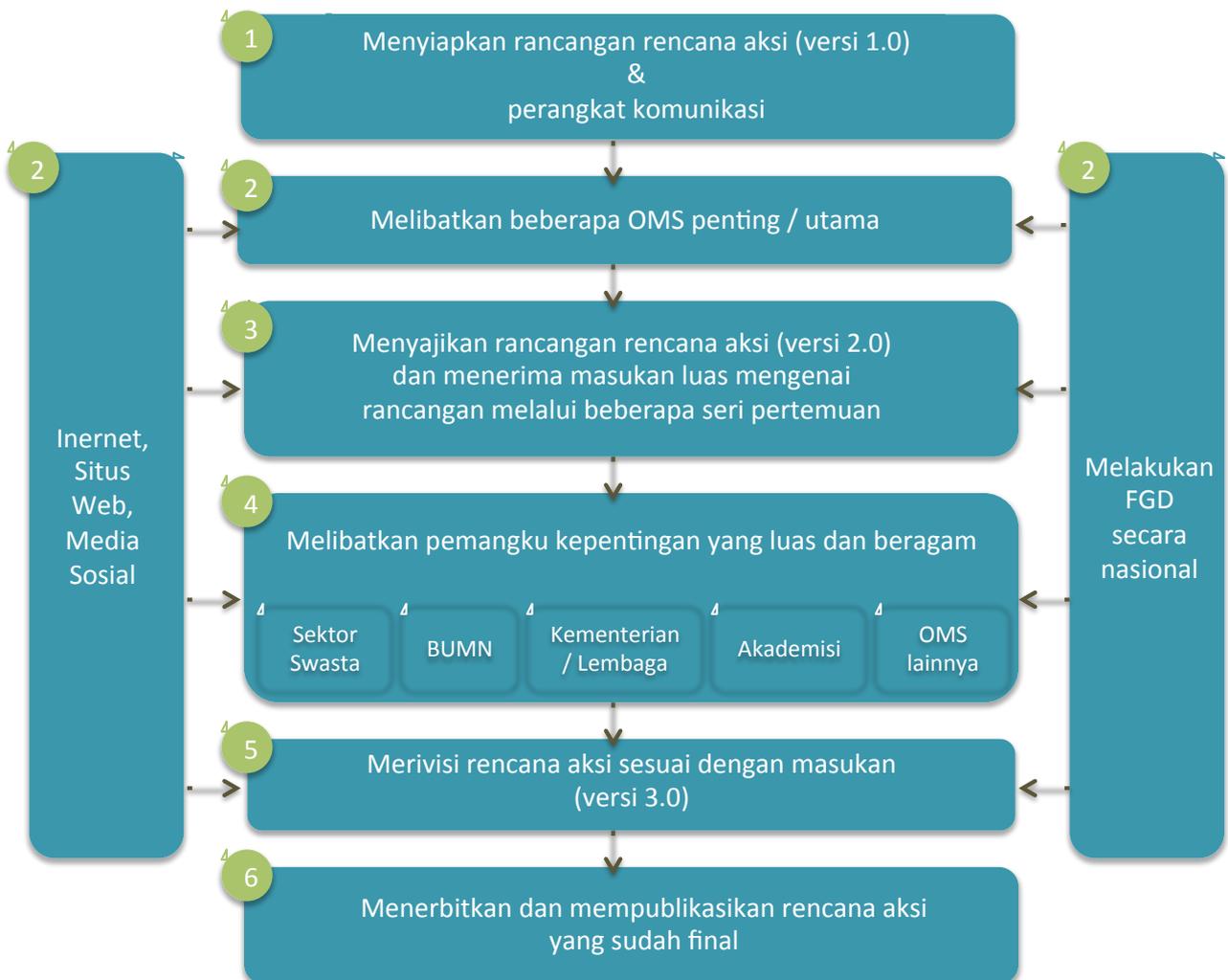
1. Tonggak-tonggak Penting dalam Perjalanan OGI



2. Diagram Konsultasi OGI

Dalam penyusunan rencana aksi, OGI melibatkan banyak pihak, termasuk di antaranya berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Diagram ini menggambarkan prosesnya secara singkat.



3. Berbagai event OGI

a. Kompetisi OGI

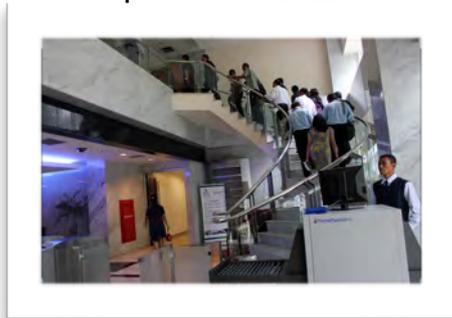
Kompetisi OGI adalah kompetisi antar-unit pelayanan publik yang diselenggarakan pada April 2012 – Agustus 2012 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan kepada 10 pemenang diberikan oleh Wakil Presiden RI.



Coach Cynthia sedang membagi ilmunya tentang Inovasi dalam Knowledge Forum: Workshop Kompetisi OG di Hotel Millenium Sirih pada 30 Mei 2012.



Seluruh peserta Kompetisi OGI diundang untuk nonton bareng film *Kita vs. Korupsi* di Djakarta Theatre pada 14 Juni 2012.



Pada 25 Juni 2012 peserta Kompetisi OGI mengunjungi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang digelar layanan paling bersih oleh KPK.



Perwakilan dari NTMC Polri yang masuk dalam 20 Besar sedang mempresentasikan progresnya di hadapan Dewan Juri di Hotel Alila, pada 18 Juli 2012.



Wakil Presiden RI memberikan Piala Kompetisi OGI kepada Inatrade dari Kementerian Perdagangan dalam Awarding di Istana Wakil Presiden.



Wakil Presiden RI, Dewan Juri, dan 10 Pemenang Kompetisi OGI setelah acara Awarding, yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2012.

b. Knowledge Forum

Knowledge Forum adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. *Knowledge Forum* diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun. Tema *Knowledge Forum* selalu berbeda-beda pada setiap pelaksanaannya. *Knowledge Forum* yang pertama diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan *Kompetisi OGI*.

b. 1. Knowledge Forum: Percepatan Pelaksanaan UU KIP.

Knowledge Forum ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pembentukan PPID di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut diikuti oleh pejabat eselon 1 dan 2 seluruh K/L dengan menghadirkan 3 narasumber utama yaitu Menteri Kominfo, Kepala UKP4, dan Kepala Komisi Informasi Pusat. Sebagai tindak lanjut, setelah *knowledge sharing* seluruh peserta dibagi dalam 5 kelompok untuk merumuskan rencana aksi tahun 2012 untuk masing-masing K/L terkait pembentukan PPID dan infrastruktur pendukungnya. Realisasi rencana aksi tersebut selanjutnya dimonitor Kemkominfo dan dilaporkan kepada UKP4.



Kepala UKP-PPP memberikan sambutan pada pembukaan Knowledge Forum.

b. 2. Knowledge Forum: Hari Hak untuk Tahu.

Knowledge Forum yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini sekaligus diadakan untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu (28 September). PPID dari seluruh Kementerian/Lembaga hadir dalam acara ini. Dalam acara ini juga diadakan beberapa sesi diskusi yang memberikan kesempatan pada PPID untuk saling belajar kepada satu sama lain. Di acara ini juga diumumkan “Peringkat KIP” untuk Badan Publik Paling Transparan tingkat Pusat dan Provinsi, yang diikuti penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres.



Pada 28 September 2012 diadakan Knowledge Forum untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) di Hotel Red Top.



Peserta kegiatan Hari Hak untuk Tahu melakukan kampanye di bundaran Hotel Indonesia tentang pentingnya hak untuk tahu.



Peserta kegiatan peringatan Hari Hak untuk Tahu membagikan brosur tentang pentingnya pemahaman hak untuk tahu.



Panitia dan para pembicara Knowledge Forum Hari Hak untuk Tahu.

b. 3. Knowledge Forum: Reformasi Penganggaran dalam Kerangka OGI.

Knowledge Forum ini diselenggarakan oleh Seknas FITRA.



FITRA pada 12 Desember 2012 mengadakan Knowledge Forum: Reformasi Penganggaran dalam Kerangka OGI.



Diskusi Knowledge Forum di sedang berlangsung di hotel Sari Pan Pacific.



Seorang peserta yang sedang bertanya tentang praktek penganggaran di Indonesia.



Deputi IV Kepala UKP-PPP, Tara Hidayat, sedang menjawab pertanyaan peserta Knowledge Forum.

c. OGI Goes to Campus

OGI Goes to Campus adalah sesi sosialisasi ke kampus-kampus yang bertujuan untuk menyebarkan semangat *open government* ke kalangan mahasiswa dan *civitas akademika*. Pada tahun 2012, telah diadakan 4 kali *OGI Goes to Campus*, yang rangkaianannya dimulai pada 26 November 2012 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2012. *OGI Goes to Campus* telah diadakan di Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Sumatera Utara Medan, dan Institut Teknologi Bandung.



OGI Goes to Campus di Universitas Hasanuddin, Makassar.



OGI Goes to Campus di Campus Center di Institut Teknologi Bandung.



Open Government Indonesia menjadi headline di majalah kampus 'Soul of Campus' ITB.



Peserta OGI Goes to Campus menuliskan komentar dan saran positif untuk gerakan Open Government di Indonesia.

d. Peringatan Hari Anti Korupsi di Monas



Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang diperingati pada tanggal 09 Desember 2012 di Lingkar Monas diikuti oleh lebih dari 2.000 orang.



Stand informasi OGI dipenuhi oleh peserta yang ingin tahu lebih banyak tentang Open Government Indonesia.



Tema peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada tahun 2012 adalah "Berani Jujur Hebat".



Para peserta peringatan HAKI menuliskan pesan-pesan anti korupsi di dinding pesan yang disediakan oleh panitia HAKI.

e. Diskusi tentang OGI di acara Bincang Edukasi.

Bincang Edukasi adalah sebuah wadah untuk para penggiat pendidikan untuk berkumpul dan berdiskusi tentang edukasi. OGI mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang gerakan ini dan mendapatkan masukan.



Suasana diskusi informal dalam salah satu sesi Bincang Edukasi.

f. Kunjungan ke Lokasi Pilot Project: Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah



PATTIRO memimpin FGD tentang rencana penerapan Open Budget dengan Pemerintah Kota Ambon pada 29 November 2012.



Diskusi implementasi Open Government di Kota Ambon pada 29 November 2012 yang dihadiri oleh UKP-PPP, Walikota Ambon, dan staf.



Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah memimpin rapat koordinasi impementasi OGI di Palangkaraya pada 28 November 2012.



Diskusi dengan tim IT Pemkab Indragiri Hulu pada 21 Juni 2012 untuk memetakan kesiapan pemerintah dalam mendukung OGI.

4. OGP Outreach di Bali Democracy Forum (BDF)

BDF dihadiri oleh 11 Kepala Negara/Pemerintahan, 42 Menteri dan Wakil Menteri, serta 45 Kepala Delegasi lainnya. Dalam kapasitas Indonesia sebagai *co-chair* OGP, maka Indonesia menyelenggarakan *OGP Outreach* untuk memperkenalkan OGP pada negara-negara yang hadir. *OGP Outreach* diadakan saat sesi makan siang di hari kedua BDF, Jumat 9 November 2012.



Suasana OGP Outreach di BDF.



Kepala UKP-PPP, Kuntoro Mangkusubroto sedang memberikan penjelasan tentang OGI.



Peserta sedang membaca brosur OGP.



Tim OGI setelah kegiatan OGP Outreach BDF.

5. Portal Satu Layanan



Portal Satu Layanan (satulayanan.net) berisi informasi lebih dari 100 layanan publik.



Salah satu informasi yang ada adalah cara menambah daya PLN dan simulasi biayanya.

6. Portal Satu Pemerintah

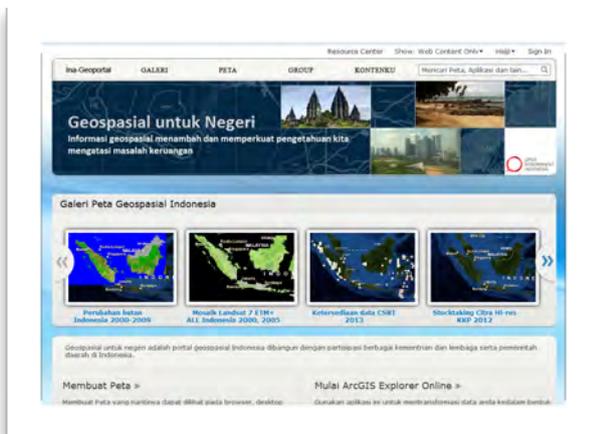


Portal Satu Pemerintah (satupemerintah.net) berisi informasi tentang kinerja dan rencana/laporan keuangan pemerintah.

No	Judul	Tahun
01	APBN Tahun 1968	1968
02	APBN Tahun 1969	1969
03	APBN Tahun 1970	1970
04	APBN Tahun 1971	1971
05	APBN Tahun 1972	1972
06	APBN Tahun 1973	1973
07	APBN Tahun 1974	1974
08	APBN Tahun 1975	1975
09	APBN Tahun 1976	1976
10	APBN Tahun 1977	1977
11	APBN Tahun 1978	1978
12	APBN Tahun 1979	1979
13	APBN Tahun 1980	1980
14	APBN Tahun 1981	1981
15	APBN Tahun 1982	1982
16	APBN Tahun 1983	1983
17	APBN Tahun 1984	1984
18	APBN Tahun 1985	1985
19	APBN Tahun 1986	1986
20	APBN Tahun 1987	1987
21	APBN Tahun 1988	1988
22	APBN Tahun 1989	1989
23	APBN Tahun 1990	1990
24	APBN Tahun 1991	1991
25	APBN Tahun 1992	1992
26	APBN Tahun 1993	1993
27	APBN Tahun 1994	1994
28	APBN Tahun 1995	1995
29	APBN Tahun 1996	1996
30	APBN Tahun 1997	1997
31	APBN Tahun 1998	1998
32	APBN Tahun 1999	1999
33	APBN Tahun 2000	2000
34	APBN Tahun 2001	2001
35	APBN Tahun 2002	2002
36	APBN Tahun 2003	2003
37	APBN Tahun 2004	2004
38	APBN Tahun 2005	2005
39	APBN Tahun 2006	2006
40	APBN Tahun 2007	2007
41	APBN Tahun 2008	2008
42	APBN Tahun 2009	2009
43	APBN Tahun 2010	2010
44	APBN Tahun 2011	2011
45	APBN Tahun 2012	2012
46	APBN Tahun 2013	2013

Salah satu informasi yang bisa didapatkan di portal Satu Pemerintah adalah laporan APBN semenjak tahun 1968 hingga RAPBN 2013.

7. Portal Satu Peta



Ina Portal (tanahair.indonesia.go.id) dibangun oleh BIG untuk memberikan akses data informasi geospasial kepada publik.

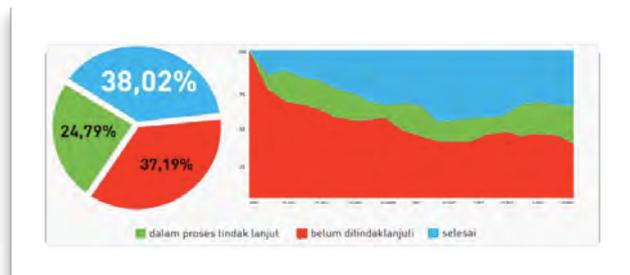


Dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2013 kembali ditegaskan peran Satu Peta karena integritas informasi geospasial adalah kunci dalam pembangunan.

8. Portal LAPOR!



Portal LAPOR! di lapor.ukp.go.id. Di sini masyarakat bisa melaporkan keluhan mereka dan bisa mengecek tindak lanjut yang telah dilakukan.



Dari seluruh laporan yang masuk, sekitar 38% telah selesai ditindaklanjuti.

9. Media Komunikasi OGI

Media Komunikasi OGI terdiri dari berbagai kanal, termasuk media *online* (twitter, website), media elektronik (video), dan media *offline*.



Akun twitter @opengovindo dengan 2.566 follower menyampaikan informasi OGI dan melaporkan langsung (*live tweet*) acara OGI.



Website resmi OGI, opengovindonesia.org, berisi berbagai informasi dan kegiatan terkait OGI.



Video OGI yang dibuat dengan merekam sketsa menjelaskan tiga pilar OGI, yaitu transparansi, partisipasi dan inovasi.



Video Kompetisi OGI menceritakan proses kompetisi OGI dan berbagai terobosan yang berhasil diraih oleh peserta Kompetisi OGI.



Brosur OGP (tampak depan)



Brosur OGP (tampak belakang)



"62 UNIT LAYANAN BERAMAI-RAJAI MELAKUKAN PERBAIKAN MELALUI KOMPETISI OPEN GOVERNMENT"

>>> Tentang Kompetisi OG

Kompetisi Open Government (OG) merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh UUP-PPR untuk memajukan Open Government Indonesia (OGI) dalam bentuk perombakan antar unit layanan publik. Ajang ini dimulai bersamaan dengan peluncuran program OG dan sudah 62 layanan publik dari 34 Kementerian/Lembaga (K/L) serta dilaksanakan untuk mendorong perbaikan layanan publik dalam media-media tersebut.

Kejasa yang-ppr Kurator Minda-subroto sendiri telah menekankan pentingnya acara ini dalam usaha meningkatkan mutu transparansi, partisipasi, dan inovasi sebagai tiga pilar penting dari sebuah pemerintahan yang lebih terbuka. Inisiatif ini dimulai Indonesia sebagai salah satu pendiri dari Open Government Partnership di tingkat global serta di-

>>> Program Peserta

Setelah melewati periode penilaian selama tiga bulan penuh, sebanyak 20 unit layanan publik yang berhasil menunjukkan progres paling mendebarkan akhirnya terpilih.

Dari berbagai perbaikan yang dipresentasikan pada sub-event Presentasi Top 20, kita dapat melihat bahwa sangat-sungguh dari K/L tersebut. Berbagai pelayanan yang ber-

sesnya tumbuh dan penuh ketidaksiapan kami sudah meminimalisirnya. Beberapa layanan terbaik implementasi terbaru, misalnya, sudah dapat selesai dalam satu hari, bisa dijangkau melalui inisiatif yang sudah membutuhkan lebih dari lima hari. Juga kini rata-rata dapat selesai dalam waktu dua hari saja.

Selain itu, pemerintah juga sudah lebih berminat dengan teknologi. Jika sebelumnya masih mengandalkan berbagai game yang dapat diakses online, NEMO Pakti yang memang telah aktif di berbagai sosial media kini sudah memiliki aplikasi BlackBerry maupun Android yang bisa diunduh oleh masyarakat.

"Kami belum sempurna, tapi kami terus berusaha" ujar perwakilan Badan Penyelenggara Administrasi SIM Polse Metro Jawa saat presentasi.

Kompetisi OG memberikan kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk dapat berkolaborasi dalam kegiatan yang berbeda dari rutinitas mereka sehari-hari. Bahal satu juta pada Presentasi Top 20, Danang Dirindawandana yang juga merupakan Ketua Ombudsman Indonesia sendiri, selama Kompetisi OG sejalan ini berhasil mendorong perbaikan layanan publik. (AFU)



Pada bulan September 2012, Indonesia menjadi ketua Open Government Partnership (OGP) bersama Inggris. OGP adalah inisiatif global untuk mendorong berbagai negara dalam menjalankan dan menginternalisasi prinsip-prinsip keterbukaan pemerintahan. Indonesia bersama Jepang, Inggris, dan Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat merupakan penggerak utama dari gerakan tersebut.

Newsletter OGI Edisi 1 (halaman 1)



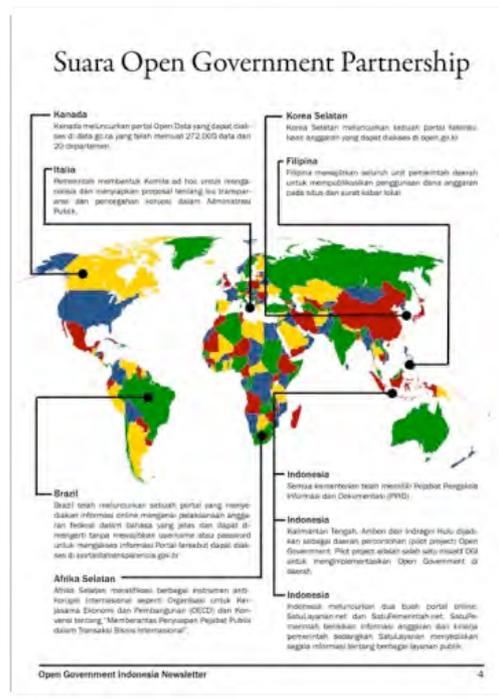
9 FAKTA PENTING TENTANG #KOMPETISIOG

- 1. "Siapa yang menyelenggarakan Kompetisi OG?"**
Yang menyelenggarakan Kompetisi OG ini adalah UUP-PPR (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
- 2. "Siapa yang menjadi peserta?"**
Bicara keseluruhan, terdapat 62 unit layanan publik dari 34 Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara sukarela mendaftar sebagai peserta kompetisi.
- 3. "Apa saja yang dinilai?"**
Kemenangan akan ditentukan oleh kombinasi unit layanan untuk menerapkan prinsip open government: 1) transparansi, 2) partisipasi, dan 3) inovasi.
- 4. "Metode penilaian seperti apa yang dipakai dalam kompetisi ini?"**
- Pengumuman dari 62 ke 20: *act assessment report* (laporan penilaian dan *mytop shopping*)
- Pemilihan Top 20 ke Top 10: *Presentasi Top 20* dan *kuysundan*
- Top 10 ke Top 5: *Online polling* (balai yang telah diumumkan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memilih layanan favoritnya melalui *Flour* www.flour.com/indonesia)
- 5. "Siapa saja jurai yang terlibat?"**
Jurai Kompetisi OG adalah individu yang terlibat dan kompeten di bidangnya masing-masing:
- Danang Dirindawandana (Ketua Ombudsman)
- Ery Nurida (Ketua Tim Independen Penilaian Bersama)
- Yoris Setiawan (Presiden Di My Goodness Agency)
- Heru Gun (Chief Editor Siva MediaHub)
- Erika Nurani (Managing Director Marketing Research Indonesia)
- 6. "Selain kompetisi, apakah terdapat kegiatan pendukung lainnya?"**
Untuk menjaga keberlanjutan dari perbaikan layanan setelah kompetisi ini berakhir, peserta juga dikuratori dalam berbagai kegiatan *capacity building* sehingga mereka dapat meneruskan proses open government nantinya. Selain itu, masyarakat juga diundang untuk terus melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
- 7. "Apa saja kegiatan *capacity building* tersebut?"**
- *Kick-off* Kompetisi
- *Workshop* "Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi"
- *Covering* Top 20
- 8. "Apa sebenarnya OG itu sendiri? Sebagai lembaga, program, atau sekadar standar/standar?"**
Kerena ini OG adalah transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat, maka OG dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.
OG adalah sebuah gerakan, bukan sebuah alat standarisasi. Itu bukan pula sebuah metode penilaian. *act* tidak akan ada sebuah *checklist* yang menunjukkan tentang Kementerian apa saja yang sudah *OG-oriented* misalnya. Sama halnya dengan *open data* (dan hal yang merupakan OG dan *open data* merupakan dua ranah yang mempersiapkan OG).
- 9. "Bagaimana cara unit layanan saya berpartisipasi?"**
Kompetisi OG hanya salah satu cara mendorong open government di Indonesia. Pada dasarnya, siapa pun bisa menerapkan OG dan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, serta inovasi. Anda dapat membuat www.ogpindonesia.org untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang OG. Selanjutnya OG juga dapat diunggah melalui www.ogpindonesia.org atau melalui Twitter @openogindo.

Newsletter OGI Edisi 1 (halaman 2)

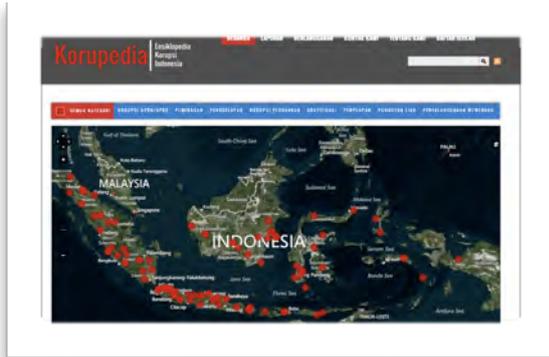


Newsletter OGI Edisi 2 (halaman 1)



Newsletter OGI Edisi 2 (halaman 4)

10. Inisiatif yang Didorong oleh OMS



Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan portal ensiklopedia koruptor Indonesia yang bernama Korupedia (korupedia.org). Portal ini berisi hampir 200 informasi koruptor.



Transparency International Indonesia (TII) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi memproduksi film *Kita versus Korupsi*.

11. Aliansi Strategis



Salah satu FGD yang diadakan di Bandung oleh Universitas Indonesia.



Pada 27 Agustus 2012, IBM berkomitmen akan membantu merancang portal Satu Layanan.



Sejak 4 September 2012, selama 1 bulan, BCG mendedikasikan 2 konsultan terbaiknya untuk membantu OGI menyusun rencana aksi.



Internship OGI batch 1 dilaksanakan pada Juli-Agustus 2012



Internship OGI batch 2 dilaksanakan pada Oktober-November 2012.

11. Tautan ke Portal-portal Penting

Open Government Indonesia

<http://opengovindonesia.org/>

Open Government Partnership

<http://www.opengovpartnership.org/>

Satu Layanan

<http://satulayanan.net/>

Satu Pemerintah

<http://satupemerintah.net/>

Satu Peta

<http://tanahair.indonesia.go.id/>

LAPOR!

<http://lapor.ukp.go.id/>

Twitter OGI

<http://twitter.com/opengovindo>

Korupedia

<http://korupedia.org/>

BILITY ACCOUNTA
ION TRANSPAI
TICIPATION PUBLIC

www.opengovindonesia.org 
www.satulayanan.net
www.satupemerintah.net

blog.opengovindonesia.org 

twitter.com/OpenGovIndo 

youtube.com/user/OpenGovIndonesia 

facebook.com/OpenGovernmentIndonesia 

PARTICIPATI
PATION OPEN
COUNTABILITY